

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PER.05/MEN.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan perlunya pemantauan terhadap perkembangan dan proses pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas agar lebih efektif, efisien, proporsional, dan berkesinambungan.

Pemantauan merupakan suatu pengamatan dan/atau pencermatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program/kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh setiap penanggung jawab kegiatan, diharapkan hasilnya dapat berguna untuk menentukan tingkat pencapaian dan optimalisasi kapasitas program/kegiatan agar terarah pada pencapaian sasaran sesuai dengan tujuannya. Selain itu, hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai bahan masukan penyusunan laporan evaluasi kinerja dan bahan penyempurnaan penyusunan perencanaan dalam keberlangsungan program/kegiatan.

Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas. Dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut dijelaskan antara lain bahwa setiap Unit Kerja Eselon I (UKE I) dan Unit Kerja Eselon II (UKE II) sebagai penanggung jawab kegiatan dan pelaksana kegiatan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan (*self monitoring*). Hasil pemantauan tersebut disampaikan kepada Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana untuk disusun sebagai Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas.

Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas Triwulan II Tahun 2015 akan menggambarkan hasil realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas selama 3 (tiga) bulan, dan laporan ini merupakan hasil akumulasi realisasi Bulan April sampai dengan Juni 2015.

B. TUJUAN

Tujuan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, baik fisik maupun keuangan dalam rangka menjamin konsistensi antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan, baik terhadap tingkat perkembangan pelaksanaannya maupun manfaat yang ditargetkan dan hambatan atau kendala yang terjadi untuk diambil tindakan korektif sedini mungkin.
3. Untuk mendukung usaha penyempurnaan perencanaan berikutnya dengan menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efisien dan efektif.

C. DASAR DAN METODOLOGI PEMANTAUAN

Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas dilakukan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
2. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri Hibah
3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PER.05/MEN.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Nomor 02/M.PPN/06/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri Di Kementerian Negara PPN/Bappenas
5. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas.
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014.
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah di Kementerian PPN/Bappenas
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.49/M.PPN/HK/03/2015 tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/12/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA SATKER) Kementerian PPN/Bappenas.
9. Petunjuk Pelaksanaan Sesmen PPN/Sestama No. 1/Juklak/Sesmen/02/2014 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas
10. Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-055.01.1.017312/2015 untuk Satker Kementerian PPN/Bappenas dan DIPA-055.01.1.966009/2015 untuk Satker Pengelola Hibah MCC.

Laporan hasil pemantauan ini disusun sesuai dengan ketentuan dasar tersebut di atas dengan melakukan analisis deskriptif berdasarkan tabulasi/hasil pengolahan data realisasi penyerapan anggaran yang disampaikan oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Biro Umum berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya dijelaskan mengenai hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program/kegiatan dan proses pencairan dana.

BAB II

GAMBARAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBN)

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2015

A. RANCANGAN TEKNOKRATIS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan visi, misi, serta tujuan organisasi di dalam Rancangan Teknokratis Renstra 2015-2019. Visi tersebut adalah untuk ***“Mewujudkan Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat menghasilkan Rencana Pembangunan Nasional yang berkualitas, Sinergis, dan kredibel demi mencapai tujuan negara yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”***

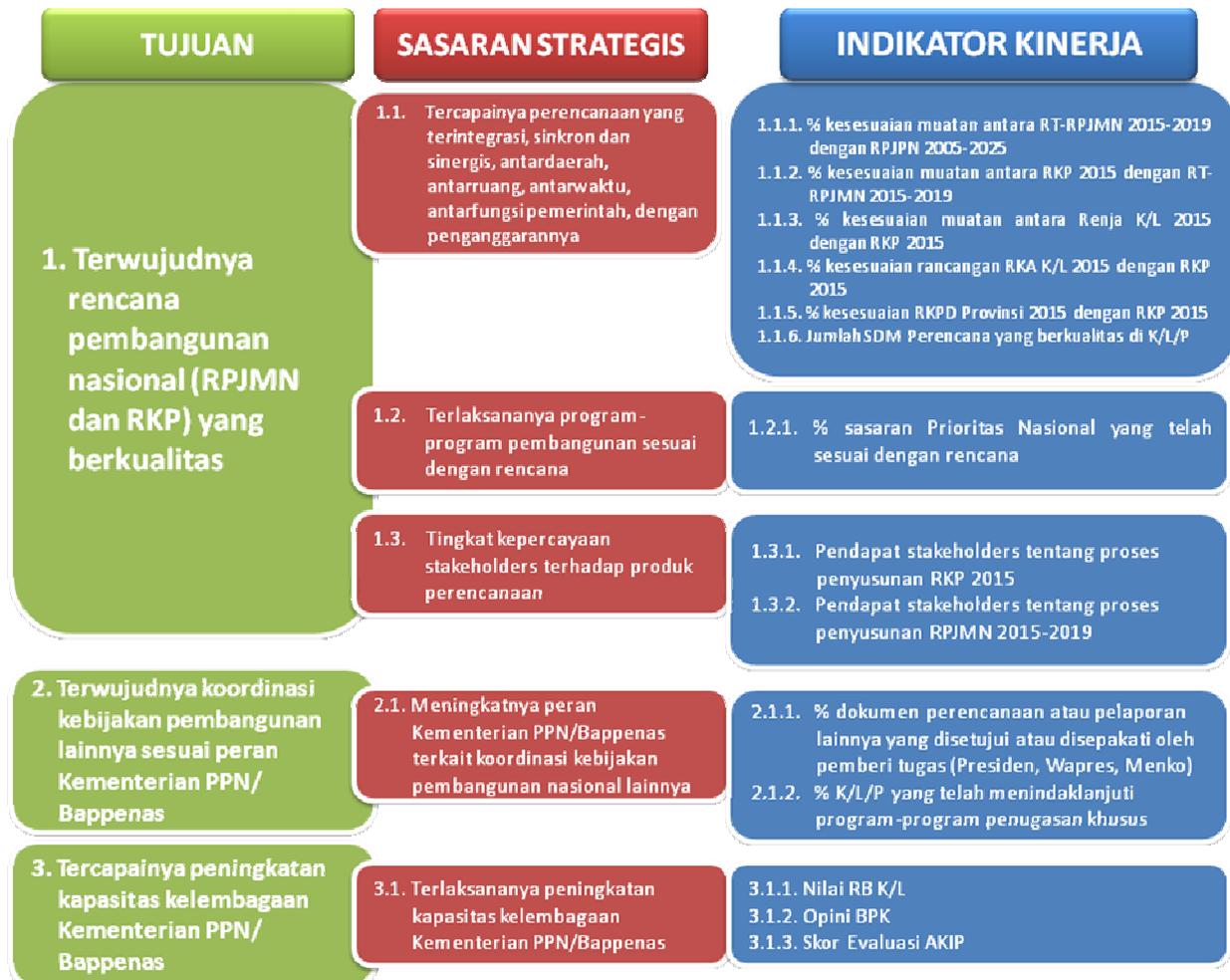
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan, dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional
2. Merumuskan, menetapkan, menyeleraskan rencana pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional (antar pusat dan daerah).
3. Melakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengan strategi dan prioritas pembangunan nasional.
4. Melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana pusat dan daerah.

B. TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kementerian PPN/Bappenas dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai sebagaimana berikut:

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2015 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkan target indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang akan dicapai melalui pelaksanaan program di Kementerian PPN/Bappenas pada tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

TABEL 1
PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah dengan penganggarannya	1. % kesesuaian muatan antara RKP 2016 dengan RPJMN 2015-2019	100%
		2. % kesesuaian muatan antara Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L) 2016 dengan RKP 2016	90%
		3. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) 2016 dengan RKP 2016	85%
		4. % kesesuaian RKP Provinsi 2015 dengan RKP 2015	50%
		5. Jumlah SDM perencana berkualitas di K/L/P tahun 2015	2.292 orang
2	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	% Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	90%
3	Tingkat kepercayaan stakeholders terhadap produk perencanaan	Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP 2016	Baik
4	Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya.	1. % dokumen perencanaan atau pelaporan lainnya yang disetujui atau disepakati oleh pemberi tugas (Presiden, Wapres, Menko)	95%
		2. % K/L/P yang telah menindaklanjuti program-program penugasan khusus	100%
5	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	Nilai RB K/L	90
		Opini BPK	WTP
		Skor Evaluasi AKIP	A

C. STRUKTUR PROGRAM DAN PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

1. Struktur Program Kementerian PPN/Bappenas

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

b. Program Generik

- 1) Program Generik 1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
- 2) Program Generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Generik 3: Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Dari berbagai program tersebut telah dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan baik yang mendukung tugas-tugas utama maupun tugas pendukung dalam melaksanakan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas.

2. Struktur Pengelolaan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas

Struktur pengelolaan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan oleh 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja (Satker), yaitu 1 Satker Utama pada tingkat Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Sesmen PPN/Sestama Bappenas), 1 Satker Pengelolaan Hibah *Millenium Challenge Corporation* (MCC), 1 Satker Majelis Wali Amanat dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF), dan 33 Satker pelaksanaan dana dekonsentrasi di setiap provinsi. Satuan Kerja utama Setmen PPN/Settama Bappenas tersebut merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang dibantu oleh satu bendaharawan pengeluaran anggaran dan satu Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), serta beberapa orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), baik PPK Program maupun PPK yang berada di setiap Unit Kerja Eselon I (UKE I) atau Kedeputan. Selain itu, pada setiap PPK dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Pengadaan.

Susunan pengelola anggaran di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.49/M.PPN/HK/03/2015 tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/12/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan

Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA SATKER) Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam proses pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran, pengelola anggaran dan unit kerja pelaksana kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas serta Petunjuk Pelaksanaan No. 2/Juklak/Sesmen/03/2014.

Dengan struktur pengelolaan anggaran tersebut diharapkan pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan, dan pelaporan realisasi penyerapan anggaran akan menjadi suatu sinergi yang positif sehingga ada sinkronisasi antar struktur program dan kegiatan dengan struktur organisasinya.

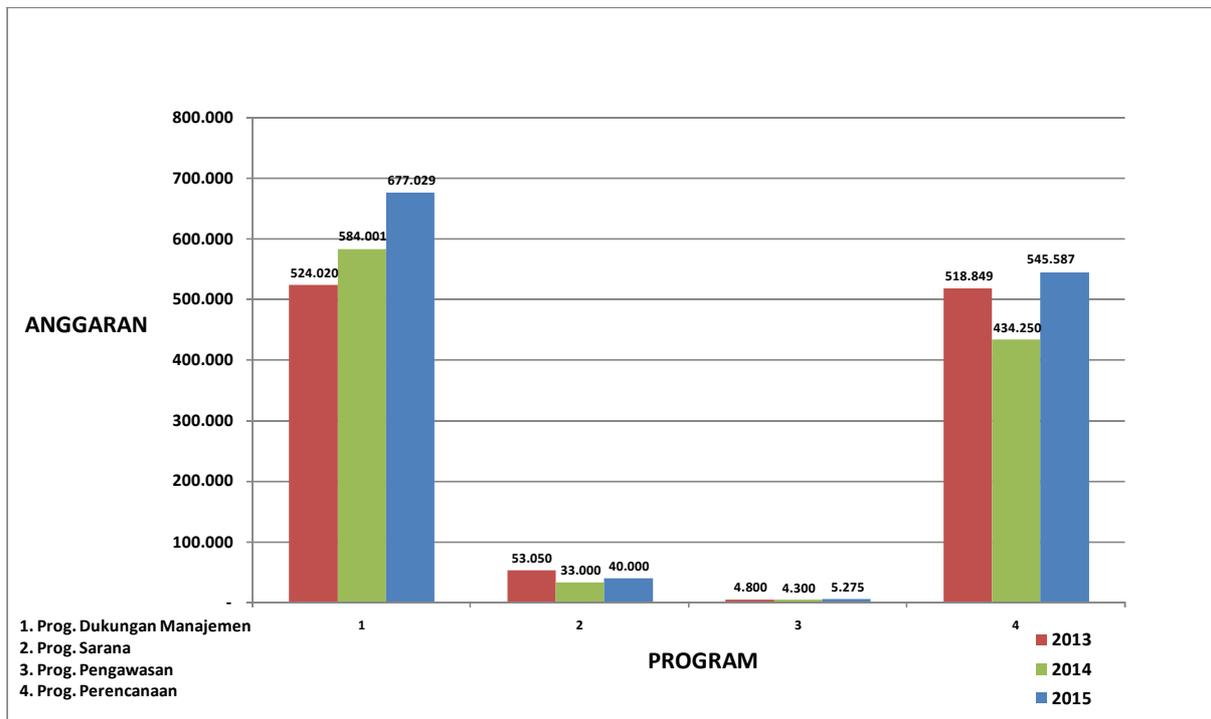
Seperti telah dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2014 terdiri dari 4 (empat) program, yaitu:

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dikelola oleh 12 (dua belas) PPK Kedeputian di lingkungan UKE I (Kedeputian), dan oleh 33 Satker di 33 provinsi.
- 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, yang dikelola oleh 4 (empat) PPK di Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas (Setmen PPN/Settama Bappenas).
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bappenas, yang dikelola oleh 1 (satu) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas.
- 4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, yang dikelola oleh 1 (satu) orang PPK di Inspektorat Utama.

D. ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2015

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, pada tahun anggaran 2015 Kementerian PPN/Bappenas mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.281.869.794.000,- yang terdiri dana rupiah murni (RM) sebesar Rp. 660.164.354.000,-, pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp. 384.058.229.000,- dan hibah luar negeri (HLN) sebesar Rp. 237.647.211.000,-. Berikut pada Gambar 1 terlihat perbandingan alokasi dana tahun 2013-2015.

GAMBAR 1
ALOKASI DANA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2013-2015



Sumber : Pagu DIPA Kementerian PPN/Bappenas

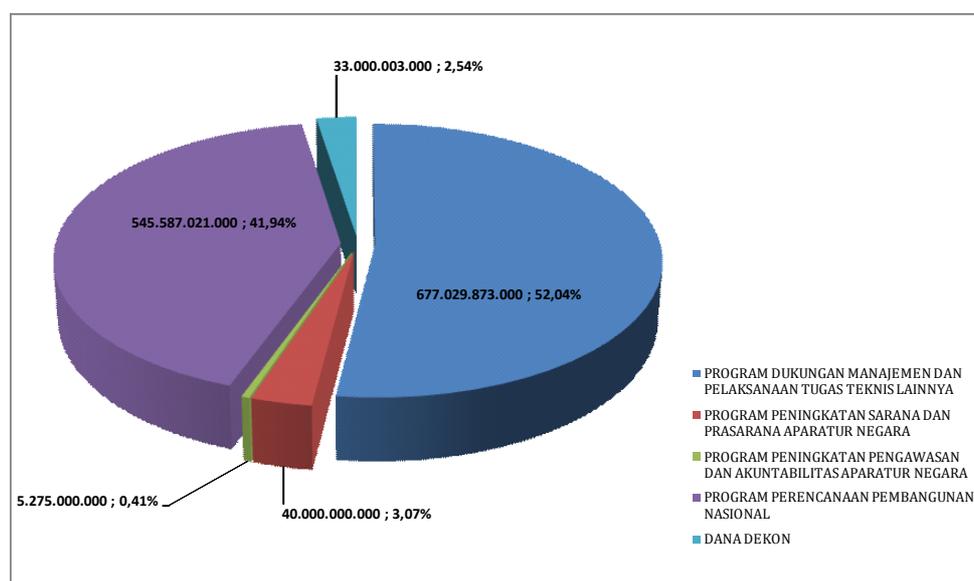
Anggaran Kementerian PPN/Bappenas dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan utama yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan penetapan kinerja tahun 2015, yang terdiri dari 2 Satker di Kementerian PPN/Bappenas yang dikelola oleh 18 (delapan belas) PPK yang tersebar di masing-masing program, dan 33 Satker di 33 provinsi. Rincian alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2015 menurut program terdapat pada Tabel 2 dan porsi anggaran masing-masing program dapat dilihat pada Gambar 2.

TABEL 2
ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2015

PROGRAM	PAGU ANGGARAN				
	RM	PHLN		JUMLAH	TOTAL
		PLN	HLN		
SATKER 017312	633.186.454.000	384.058.229.000	27.647.211.000	411.705.440.000	1.044.891.894.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	371.112.914.000	305.916.959.000	-	305.916.959.000	633.470.049.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	40.000.000.000	-	-	-	40.465.872.000
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	5.275.000.000	-	-	-	5.275.000.000
Perencanaan Pembangunan Nasional	216.798.540.000	78.141.270.000	27.647.211.000	105.788.481.000	322.587.021.000
SATKER 966009	13.977.900.000	-	-	-	13.977.900.000
PPK ICCTF	13.977.900.000	-	-	-	13.977.900.000
SATKER 966009	13.000.000.000	-	210.000.000.000	210.000.000.000	223.000.000.000
PPK Sekretariat Persiapan dan Pengembangan MCC	13.000.000.000	-	210.000.000.000	210.000.000.000	223.000.000.000
JUMLAH	660.164.354.000	384.058.229.000	237.647.211.000	621.705.440.000	1.281.869.794.000

Sumber : Pagu DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015

GAMBAR 2
PROPORSI ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2015



Dari Tabel 3 dan Gambar 2 tersebut dapat diketahui bahwa Program Perencanaan Pembangunan Nasional (termasuk dana yang dikelola oleh Pengelola Hibah MCC dan satker pengelola dana dekonsentrasi di seluruh provinsi) merupakan program yang mempunyai alokasi dana terbesar diantara program-program yang lain, kemudian disusul Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya yang mengelola gaji, tunjangan serta kegiatan strategis yang melibatkan hampir semua unit kerja eselon I dan II.

Pada tahun 2015, khusus untuk dana PHLN di Kementerian PPN/Bappenas terdapat 4 (empat) PLN dan 15 (lima belas) HLN, dengan nilai total sebesar Rp. 621.705.440.000,- (termasuk dana rupiah pendamping untuk PHRDP III dan PHRDP IV), sebagaimana terdapat pada Tabel 3 berikut:

TABEL 3
ALOKASI ANGGARAN PHLN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	PROGRAM	PHLN		JUMLAH
		PLN	HLN	
	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	305.916.959.000	-	305.916.959.000
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas IV	305.916.959.000	-	305.916.959.000
a	Pusbindiklatren	305.916.959.000	-	305.916.959.000
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	78.141.270.000	237.647.211.000	315.788.481.000
2	PPK Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	-	9.653.767.000	9.653.767.000
a	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	-	8.359.714.000	8.359.714.000
b	Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	1.294.053.000	1.294.053.000
3	PPK Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-	1.339.105.000	1.339.105.000
a	Direktorat Lingkungan Hidup	-	1.339.105.000	1.339.105.000
4	PPK Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	11.285.000.000	15.990.091.000	27.275.091.000
A	Direktorat Transportasi	11.285.000.000	14.100.000.000	25.385.000.000
B	Direktorat Permukiman dan Perumahan	-	1.890.091.000	1.890.091.000
5	PPK Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah	4.070.000.000	664.248.000	4.734.248.000
a	Direktorat Pengembangan Wilayah	4.070.000.000	-	4.070.000.000
b	Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	-	664.248.000	664.248.000
6	PPK Program Sumber Daya Air Terpadu	9.900.000.000	-	9.900.000.000
7	PPK Sekretariat <i>Infrastructure Reform Sector Development Program</i>	52.886.270.000	-	52.886.270.000
8	PPK Sekretariat Persiapan Dan Pengembangan MCC (Satker 966009)	-	210.000.000.000	210.000.000.000
	JUMLAH	384.058.229.000	237.647.211.000	621.705.440.000

Sumber : Pagu DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun anggaran 2015 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 545.587.021.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 243.776.440.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 315.788.481.000,-.

Alokasi anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/ penganggarannya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/ fungsi pemerintahan.
- 2) Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- 3) Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.
- 4) Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

Khusus untuk penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah bertujuan untuk (1) memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan (2) memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional.

Pengelolaan anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut terbagi menjadi 4 Satker yang terdiri dari:

- 1) Satker 017312 yang dikelola oleh 11 (sebelas) PPK yang berada di UKE I Kedepatian (sebagaimana terdapat pada Tabel 4).
- 2) Satker 966010 yang dikelola oleh 1 (satu) PPK ICCTF (sebagaimana terdapat pada Tabel 4).
- 3) Satker 966009 yang dikelola oleh 1 (satu) PPK Pengelola Hibah MCC (sebagaimana terdapat pada Tabel 5).
- 4) Satker Dana Dekonsentrasi (33 Satker) di 33 provinsi (sebagaimana terdapat pada Tabel 6).

TABEL 4
ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MENURUT PPK TAHUN ANGGARAN 2015

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN				TOTAL
		RM	PHLN		JUMLAH	
			PLN	HLN		
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	243.776.440.000	78.141.270.000	237.647.211.000	315.788.481.000	545.587.021.000
1	PPK Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	21.677.760.000	-	9.653.767.000	9.653.767.000	31.331.527.000
2	PPK Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	16.740.000.000	-	-	-	16.740.000.000
3	PPK Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM	22.900.000.000	-	-	-	22.900.000.000
4	PPK Deputy Bidang Ekonomi	15.540.000.000	-	-	-	15.540.000.000
5	PPK Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	21.554.940.000	-	1.339.105.000	1.339.105.000	22.894.045.000
6	PPK Deputy Bidang Sarana dan Prasarana	24.066.860.000	11.285.000.000	15.990.091.000	27.275.091.000	51.341.951.000
7	PPK Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah	34.280.000.000	4.070.000.000	664.248.000	4.734.248.000	39.014.248.000
8	PPK Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan	15.410.000.000	-	-	-	15.410.000.000
9	PPK Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan	14.690.000.000	-	-	-	14.690.000.000
10	PPK Program Sumber Daya Air Terpadu	6.724.000.000	9.900.000.000	-	9.900.000.000	16.624.000.000
11	PPK Sekretariat <i>Infrastructure Reform Sector Development Program</i>	23.214.980.000	52.886.270.000	-	52.886.270.000	76.101.250.000
12	PPK ICCTF	13.977.900.000	-	-	-	13.977.900.000
13	PPK Sekretariat Persiapan Dan Pengembangan MCC (Satker 966009)	13.000.000.000	-	210.000.000.000	210.000.000.000	223.000.000.000

Sumber : Pagu DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015

TABEL 5
ALOKASI DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2015

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ALOKASI (Rp)
1	10025	DKI Jakarta	799.291.000
2	20060	Jawa Barat	838.291.000
3	30060	Jawa Tengah	915.691.000
4	40069	DI Yogyakarta	920.491.000
5	50060	Jawa Timur	943.291.000
6	60004	Aceh	1.045.291.000
7	70060	Sumatera Utara	1.006.891.000
8	80019	Sumatera Barat	958.891.000
9	90020	Riau	962.491.000
10	100086	Jambi	931.291.000
11	110060	Sumatera Selatan	920.491.000
12	120022	Lampung	882.091.000
13	130019	Kalimantan Barat	949.291.000
14	140018	Kalimantan Tengah	960.691.000
15	150060	Kalimantan Selatan	961.291.000
16	160019	Kalimantan Timur	1.006.291.000
17	170021	Sulawesi Utara	1.079.491.000
18	180060	Sulawesi Tengah	1.080.091.000
19	190060	Sulawesi Selatan	1.008.091.000
20	200019	Sulawesi Tenggara	1.027.891.000
21	210019	Maluku	1.190.491.000
22	220060	Bali	976.291.000
23	230020	Nusa Tenggara Barat	974.491.000
24	240026	Nusa Tenggara Timur	1.078.291.000
25	250060	Papua	1.252.891.000
26	260070	Bengkulu	940.291.000
27	280016	Maluku Utara	1.167.091.000
28	290009	Banten	823.291.000
29	300092	Bangka Belitung	913.291.000
30	310060	Gorontalo	1.063.891.000
31	320099	Kepulauan Riau	955.291.000
32	330096	Papua Barat	1.400.491.000
33	340030	Sulawesi Barat	1.066.291.000
JUMLAH			33.000.003.000

Sumber : Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 2 tahun 2015

Alokasi dana dekonsentrasi tahun 2015 sebesar Rp. 33.000.003.000,- dengan sasaran penyelenggaraan dekonsentrasi penguatan sinergi pusat dan daerah di 33 provinsi.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah untuk meningkatkan efektifitas penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2015 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 677.029.873.000,-. Alokasi ini terdiri dari dana rupiah murni (RM) sebesar Rp. 371.112.914.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 305.916.959.000,- yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
- 2) Penyempurnaan ketatalaksanaan.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
- 4) Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (*brand image building*).
- 5) Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 6) Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.
- 7) Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan daerah.

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dikelola oleh 5 (lima) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci alokasi anggaran tahun 2015 pada masing-masing PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (PPK DM) dapat dilihat pada Tabel 6.

TABEL 6
ALOKASI ANGGARAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
MENURUT PPK TAHUN ANGGARAN 2015

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN				TOTAL
		RM	PHLN		JUMLAH	
			PLN	HLN		
	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	371.112.914.000	305.916.959.000	-	305.916.959.000	677.029.873.000
1	PPK DM I	57.749.558.000	-	-	-	57.749.558.000
2	PPK DM II	31.541.362.000	-	-	-	31.541.362.000
3	PPK DM III	225.625.001.000	-	-	-	225.625.001.000
4	PPK DM IV	54.756.993.000	305.916.959.000	-	305.916.959.000	360.673.952.000
5	PPK DOM	1.440.000.000				1.440.000.000

Sumber : Pagu DIPA Bappenas Tahun 2015

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas adalah meningkatnya akses sarana dan prasarana, penguasaan data/informasi dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000.000,-. Anggaran program ini dikelola oleh PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bappenas yang dilaksanakan oleh Biro Umum. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran.
- 2) Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum Dan Operasional.
- 3) Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan.

4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Sasaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas adalah meningkatnya efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan bebas Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN). Untuk mendukung

pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2015 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.275.000.000,-.

Anggaran program ini dikelola oleh PPK Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara yang berada di bawah pembinaan Inspektur Utama dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada UKE I dan II di Inspektorat Utama.

E. PERUBAHAN (REVISI) DIPA TAHUN 2015

Sampai dengan Triwulan II tahun 2015, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan perubahan/revisi DIPA, diantaranya:

1. Revisi 1 tanggal 24 Februari 2015. Revisi yang dilakukan adalah perubahan akun belanja.
2. Revisi 1 (satker 966009) tanggal 3 Maret 2015. Revisi yang dilakukan adalah penambahan pagu hibah pada PPK Sekretariat Persiapan dan Pengembangan MCC menjadi Rp. 210.000.000.000,-.
3. Revisi 2 tanggal 20 April 2015. Revisi yang dilakukan adalah :
 - 1) Penambahan Belanja Operasional (002) sebesar Rp. 1.322.100.000,- pada PPK Program Dukungan Manajemen III (Biro Umum) yang berasal dari ICCTF.
 - 2) Penambahan pagu Pinjaman Pusbindiklatren menjadi Rp. 186.739.102.000,- pada kegiatan SPIRIT/WB, Rp. 29.045.744.000,- pada kegiatan PHRDP-III, dan Rp. 90.132.113.000,- pada kegiatan PHRDP-IV.
 - 3) Penambahan pagu Hibah Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Hibah *Assistance For Rice Fortification Or The Poor* (Hibah JFPR) pada Direktorat Kesehatan dan gizi masyarakat menjadi Rp. 3.059.130.000,- pada.
 - 4) Penambahan pagu Pinjaman Direktorat PKPS (IRSDP) menjadi Rp. 52.886.270.000,-.
 - 5) Pencatatan Hibah kegiatan *Slum Alleviation Policy and Action Plan* (SAPOLA) pada Direktorat Permukiman dan Perumahan ke dalam DIPA sebesar Rp. 1.890.091.000,-.
 - 6) Revisi Nomor Register *Hibah Urban Mobility Denpasar* pada Direktorat Transportasi.
 - 7) Realokasi Satker ICCTF sebesar Rp. 13.977.900.000,-.

4. Revisi 3 tanggal 25 Mei 2015. Revisi yang dilakukan adalah :
- 1) Pencantuman pagu Hibah kegiatan *People Centered Development Programme (PCDP)* pada Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal sebesar Rp. 664.248.000,-.
 - 2) Pencantuman pagu Hibah kegiatan UNFPA Country Programme Eight 2011-2015 pada Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 1.294.053.000,-.
 - 3) Pencantuman pagu Hibah kegiatan *Roadmap : Support To The Acceleration Of MDGs Achievement In Indonesia* pada Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat sebesar Rp. 2.045.388.000,-.
 - 4) Pencantuman pagu Hibah kegiatan Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama RI-UNICEF 2011-2015 pada Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat sebesar Rp. 3.255.196.000,-.

BAB III

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2015

Sebagaimana dijelaskan di atas alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015 secara keseluruhan sebesar Rp. 1.281.869.794.000,- yang terdiri dana rupiah murni (RM) sebesar Rp. 660.164.354.000,-, pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp. 384.058.229.000,- dan hibah luar negeri (HLN) sebesar Rp. 237.647.211.000,-. Realisasi penyerapan anggaran (diluar pelaksanaan dana dekonsentrasi) sampai dengan Juni 2015 sebesar Rp. 334.170.003.256,- (26,07%), yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 153.933.907.260,- (23,32%), dana PHLN sebesar Rp. 180.236.095.996,- (28,99%). Sedangkan alokasi anggaran kegiatan Dekonsentrasi tahun 2015 sebesar Rp. 33.000.003.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II (akhir Juni) tahun 2015 yang dilaksanakan dari masing-masing program sebagaimana terdapat pada Tabel 7.

TABEL 7
REALISASI ANGGARAN SATKER KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015

PROGRAM	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	101.427.502.306	27,33	62.461.651.411	20,42	163.889.153.717	24,21
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	1.489.747.800	3,72	-	-	1.489.747.800	3,72
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	1.042.316.582	19,76	-	-	1.042.316.582	19,76
Perencanaan Pembangunan Nasional	49.974.340.572	20,50	117.774.444.585	37,30	167.748.785.157	30,75
JUMLAH	153.933.907.260	23,32	180.236.095.996	28,99	334.170.003.256	26,07

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

Secara rinci realisasi penyerapan anggaran tahun 2014 dari masing-masing program dijelaskan sebagai berikut:

A. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

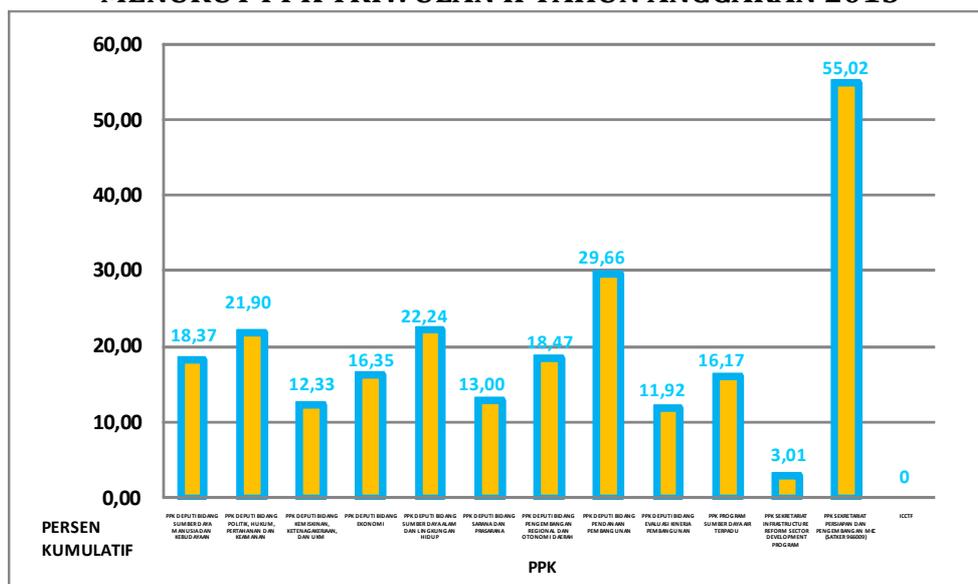
Alokasi anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Satker Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp. 545.587.021.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 243.776.440.000,-, dana PHLN sebesar Rp. 315.788.481.000,-. Sampai dengan bulan Juni 2015, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 167.748.785.157,- (30,75%).

Anggaran program ini dikelola oleh 13 (tiga belas) PPK yang berada di UKE I dengan rincian realisasi penyerapan anggaran dan komposisinya sebagaimana terdapat pada Tabel 8 dan Gambar 3, serta penjelasannya sebagai berikut:

TABEL 8
REALISASI ANGGARAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(NON DANA DEKONSENTRASI)
TRIWULAN II TAHUN 2015

NO	PROGRAM	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN									
		RM	%	PHLN						TOTAL	%
				PLN	%	HLN	%	JUMLAH	%		
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		49.974.340.572	20,50	1.491.758.153	1,91	116.282.686.432	48,93	117.774.444.585	37,30	167.748.785.157	30,75
1	PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	5.373.325.400	24,79	-	-	381.886.580	3,96	381.886.580	3,96	5.755.211.980	18,37
2	PPK DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	3.666.707.345	21,90	-	-	-	-	-	-	3.666.707.345	21,90
3	PPK DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM	2.823.145.668	12,33	-	-	-	-	-	-	2.823.145.668	12,33
4	PPK DEPUTI BIDANG EKONOMI	2.541.336.127	16,35	-	-	-	-	-	-	2.541.336.127	16,35
5	PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	5.091.566.850	23,62	-	-	-	-	-	-	5.091.566.850	22,24
6	PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA	6.674.045.936	27,73	-	-	-	-	-	-	6.674.045.936	13,00
7	PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH	7.205.444.815	21,02	-	-	-	-	-	-	7.205.444.815	18,47
8	PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN	4.570.185.321	29,66	-	-	-	-	-	-	4.570.185.321	29,66
9	PPK DEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	1.750.856.606	11,92	-	-	-	-	-	-	1.750.856.606	11,92
10	PPK PROGRAM SUMBER DAYA AIR TERPADU	1.197.068.857	17,80	1.491.758.153	15,07	-	-	1.491.758.153	15,07	2.688.827.010	16,17
11	PPK SEKRETARIAT INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROGRAM	2.289.004.359	9,86	-	-	-	-	-	-	2.289.004.359	3,01
12	PPK ICCTF (SATKER 966010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PPK SEKRETARIAT PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN MCC (SATKER 966009)	6.791.653.288	52,24	-	-	115.900.799.852	55,19	115.900.799.852	55,19	122.692.453.140	55,02

GAMBAR 3
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MENURUT PPK TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015



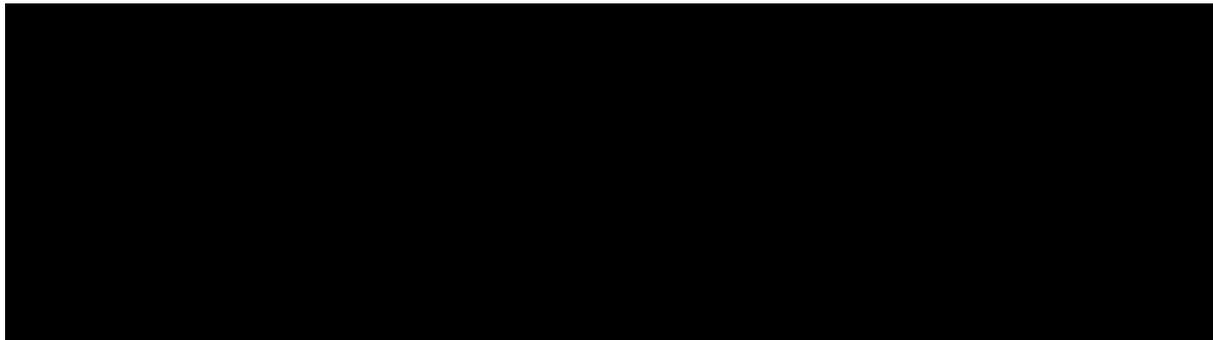
Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

Realisasi penyerapan tertinggi PPK sampai dengan Triwulan II tahun 2015 adalah PPK *Millennium Corporation Challenges* (MCC) yaitu 40,57%, disusul oleh PPK Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan 12,83%. Sedangkan penyerapan terendah adalah PPK Evaluasi Kinerja Pembangunan 1,87%. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait realisasi penyerapan di masing-masing PPK.

1) PPK Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan pada sebesar Rp. 31.331.527.000,- terdiri dari dana RM sebesar Rp. 21.677.760.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 9.653.767.000,-. Sampai dengan akhir bulan Juni, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.755.211.980,- (18,37%) sebagaimana terdapat dalam Tabel 9.

TABEL 9
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TRIWULAN II TAHUN 2015



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

Dana HLN pada Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan dipergunakan untuk kegiatan Koordinasi Pengelolaan Hibah *Assistance For Rice Fortification For the Poor* (Hibah JFPR : *Assistance for Rice Fortification for the poor*) pada Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Hibah dari ADB ini akan berakhir pada akhir tahun ini. Pengumpulan data akhir (endline) diselesaikan pada akhir Mei 2015, dan sampai dengan 30 Juni 2015 masih dilakukan pengolahan dan analisis data, sehingga penarikan baru dilakukan tahap pertama, dan tahap selanjutnya pada akhir Juli 2015.

Hibah langsung yang tidak masuk dalam DIPA adalah:

- a. *Country Programme Action Plan (CPAP) 2011-2015 Government of Indonesia - UNICEF Programme of Cooperation*. Tujuan dari hibah ini adalah untuk mendukung Pemerintah dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Millenium

(MDGs). Dengan nilai alokasi USD 1.518.014 untuk pelaksanaan tahun 2015, hibah ini sudah menarik dana Rp 1.705.598.495,00.

- b. *Support to the Acceleration of MDG Achievement in Indonesia (2013-2015)*. Hibah dari UNDP dengan nilai alokasi USD 900.000 telah dimulai pada 31 Januari 2013 dan akan berakhir pada 31 Desember 2015 bertujuan untuk percepatan tujuan MDGs. Alokasi dana pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 2.045.388.000 dan realisasi pada Triwulan II adalah sebesar Rp 631.200.898.

Kedua hibah ini dilaksanakan oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

- c. *Country Programme Eight 2011-2015 (Programme of Cooperation between The GOI – UNFPA)*. Dengan tujuan untuk mendukung tercapainya tujuan RPJM, MDGs dan ICPD, pada akhir periode pelaksanaan, hibah ini dialokasikan sebesar USD 206.463 (Rp 2.461.055.000) untuk kegiatan Strategi Dinamika Kependudukan (PDS). Hibah ini dilaksanakan oleh Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan triwulan II hanya terserap sebesar 32%, hal tersebut ada beberapa kegiatan yang mengalami kendala : a. Finalisasi Modul dan Cetak Modul belum dapat dilaksanakan. Modul masih dalam perbaikan oleh konsultan, b. Belum dilaksanakannya regional training (dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan II), c. *Policy Dialog Roundtable* ditunda pelaksanaannya pada triwulan II, d. Kegiatan penguatan kapasitas pengelola kegiatan dalam rangka persiapan penutupan proyek CP 8 (2011-2015) dan persiapan modalitas CP-9 (2016-2020) Program Kerjasama RI dan UNFPA ditunda di kuartal 3. Sampai dengan akhir bulan Juni 2015, SPHL/SP2HL/MPHL belum dapat diproses dikarenakan belum ada Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian PPN/Bappenas (KPA) pengganti. Namun demikian, dengan telah ditetapkannya KPA di awal bulan Juli, maka akan dapat segera memproses pengesahan tersebut

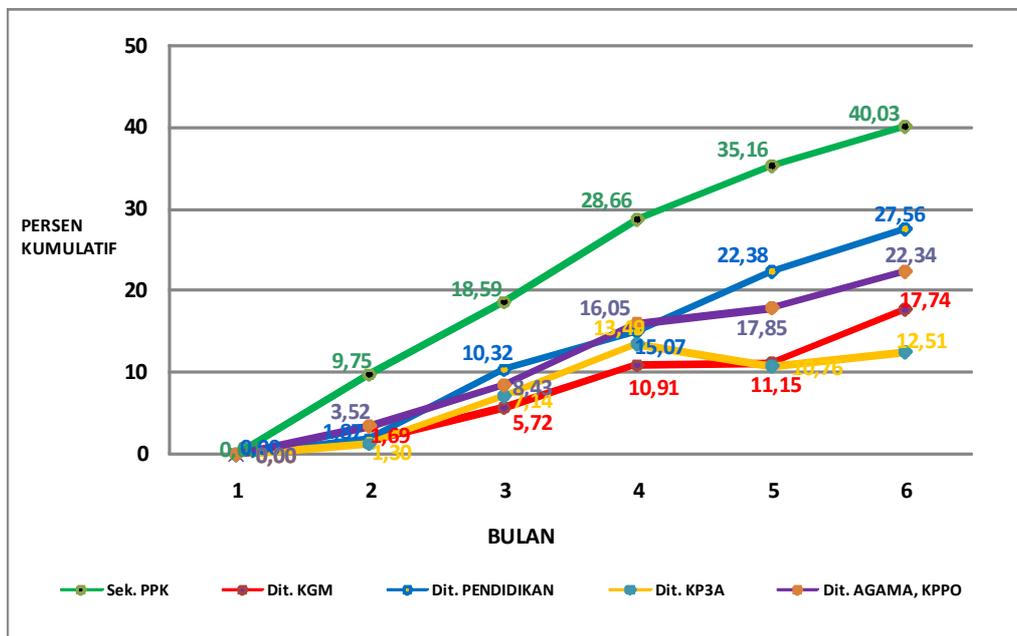
Permasalahan yang dihadapi oleh PPK Kedeputian SDM dan Kebudayaan antara lain :

- Pada awal tahun, fokus pada proses sosialisasi RPJMN 2015-2019 dan penyusunan RKP 2016;
- Terjadi keterlambatan pencairan awal bulan Juni 2015 dikarenakan ada perubahan sistem aplikasi penggantian nama rekening Bendahara Pengeluaran Anggaran Bappenas.
- Keterlambatan pencairan TUP sebagai salah satu sarana pendukung untuk realisasi kegiatan.

- Kepastian alokasi tambahan dari Kegiatan Prakarsa Strategis dan QuickWin (QW) yang baru diterima pada bulan Juni 2015, sehingga belum dapat optimal terealisasi.
- Rencana restrukturisasi Bappenas.
- Penyerapan Hibah yang belum dapat dicatatkan dan menunggu proses input pada aplikasi dari KPPN.

Realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja dapat terlihat pada Gambar 4.

GAMBAR 4
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2015



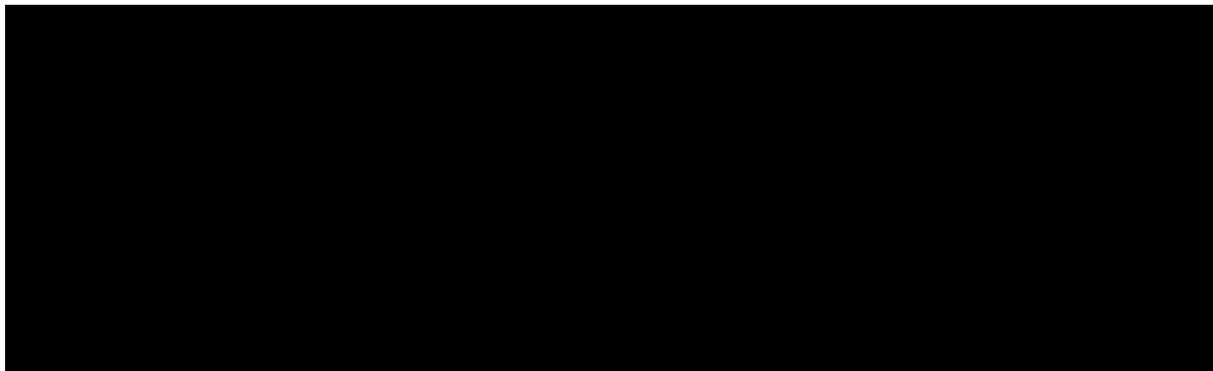
2) PPK Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) sebesar Rp. 16.740.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Juni 2015 sebesar Rp. 3.666.707.345,- (21,90%). Kegiatan yang dilaksanakan oleh UKE II di Kedeputian Bidang Polhukhankam dalam rangka mendukung penyusunan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan rencana pendanaan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 10 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 5.

Realisasi anggaran PPK Deputy Polhukhankam masih rendah, dikarenakan :

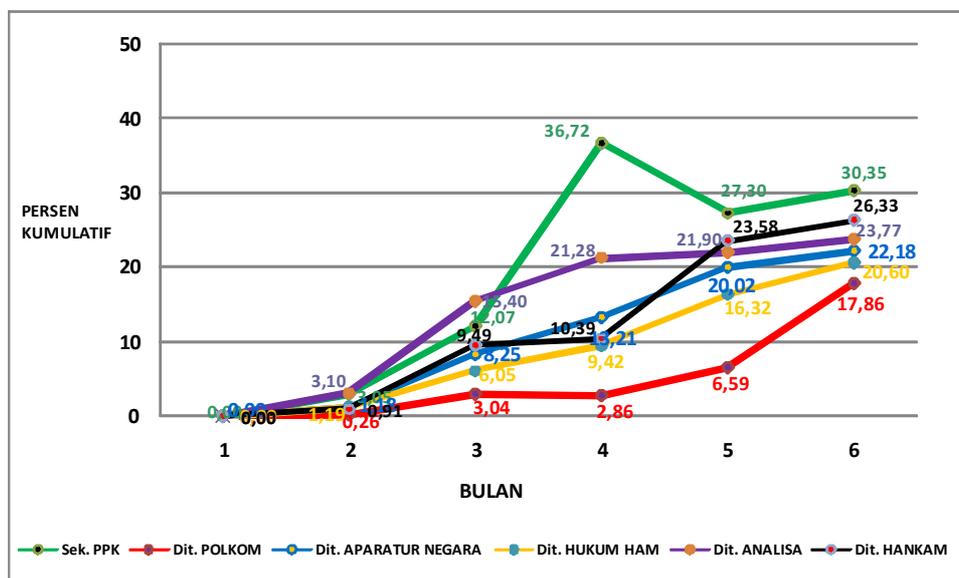
- Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dibiayai oleh mitra kerja dan/atau donor
- Kegiatan-kegiatan koordinasi strategis baru turun pada Revisi DIPA akhir Mei 2015
- Aturan yang ketat untuk rapat di hotel
- Inpres Stranas PPK baru terbit pada Mei 2015
- Adanya pergantian direktur
- Perlu pematangan dan finalisasi konsep

TABEL 10
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG POLHUKHANKAM TRIWULAN II TAHUN 2015



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

GAMBAR 5
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG POLHUKHANKAM TRIWULAN II TAHUN 2015



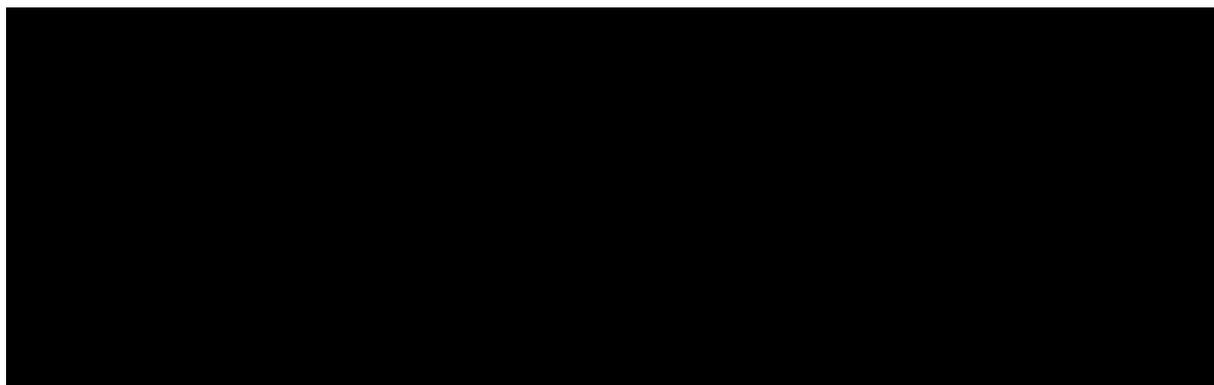
3) PPK Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp. 22.900.000.000,-, dengan realisasi penyerapan sampai dengan Juni 2015 sebesar Rp. 2.823.145.668,- (12,33%). Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 11 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 6.

Penyerapan anggaran masih rendah, dikarenakan :

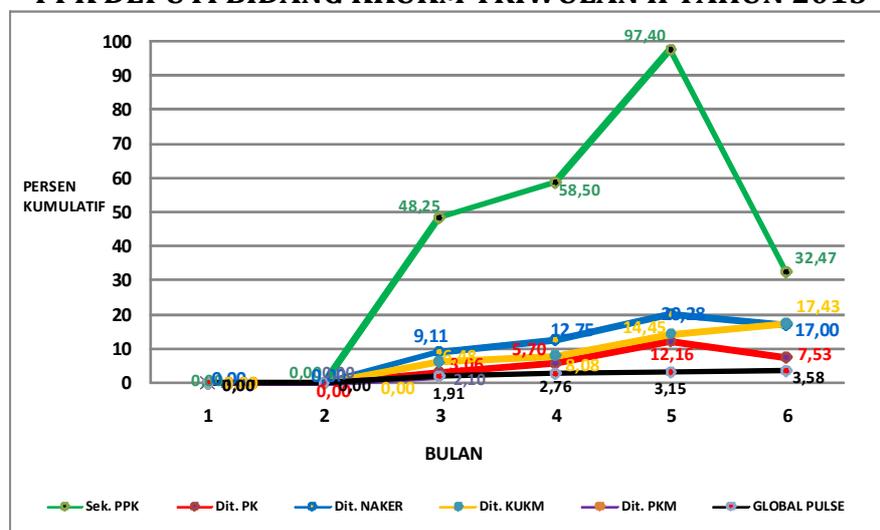
- Kegiatan Koordinasi Strategis berjalan mulai efektif per Juli 2015
- Penelaahan kembali struktur organisasi di Steering Committe Global Pulse dan Pola Kerjasamanya

TABEL 11
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG KKUKM TIRWULAN I TAHUN 2015



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

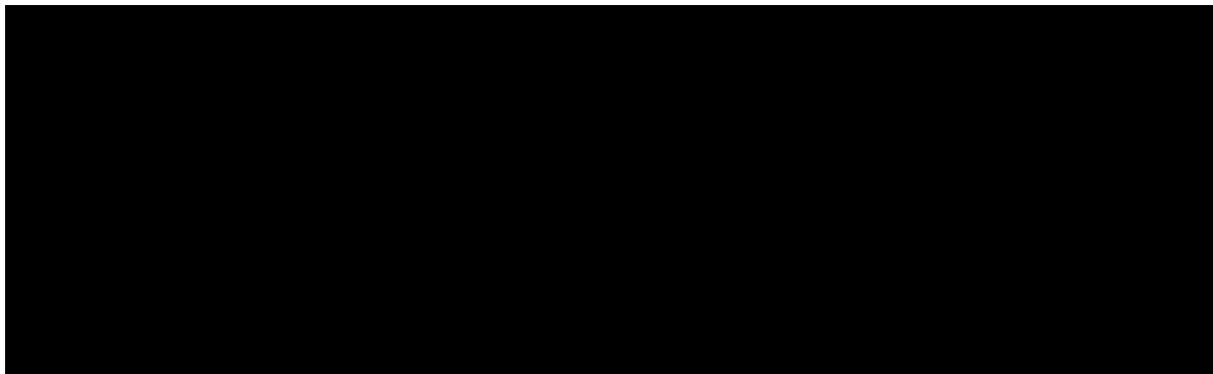
GAMBAR 6
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG KKUKM TRIWULAN II TAHUN 2015



4) PPK Deputi Bidang Ekonomi

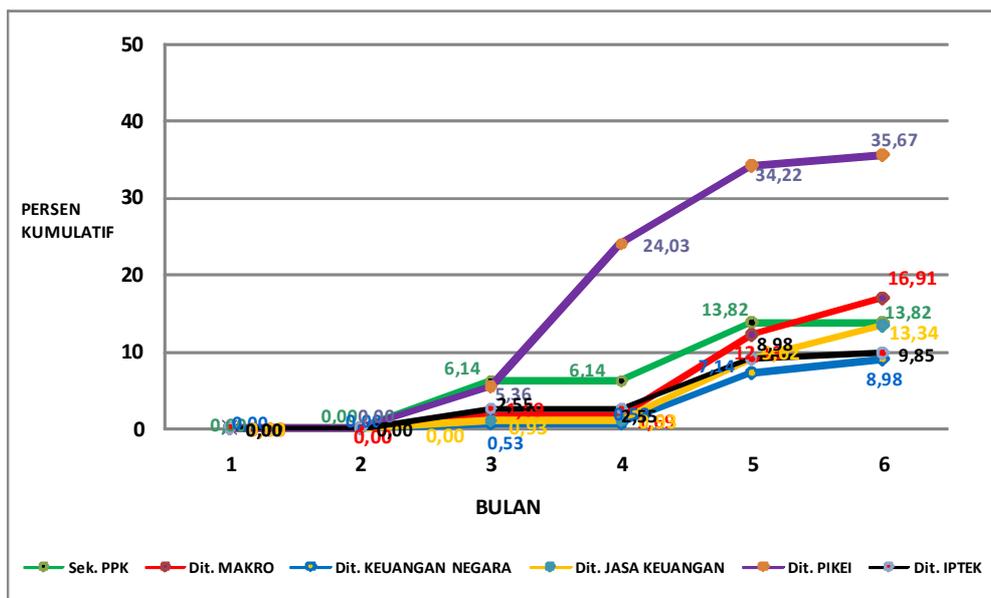
Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Ekonomi sebesar Rp. 15.540.000.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan Juni 2015 sebesar Rp. 2.541.336.127,- (16,35%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II termasuk untuk kegiatan koordinasi kedeputian sebagaimana terdapat pada Tabel 12 dan dengan perkembangan realisasi penyerapan anggaran setiap bulan terlihat pada Gambar 7.

TABEL 12
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG EKONOMI TRIWULAN II TAHUN 2015



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

GAMBAR 7
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI EKONOMI TRIWULAN II TAHUN 2015



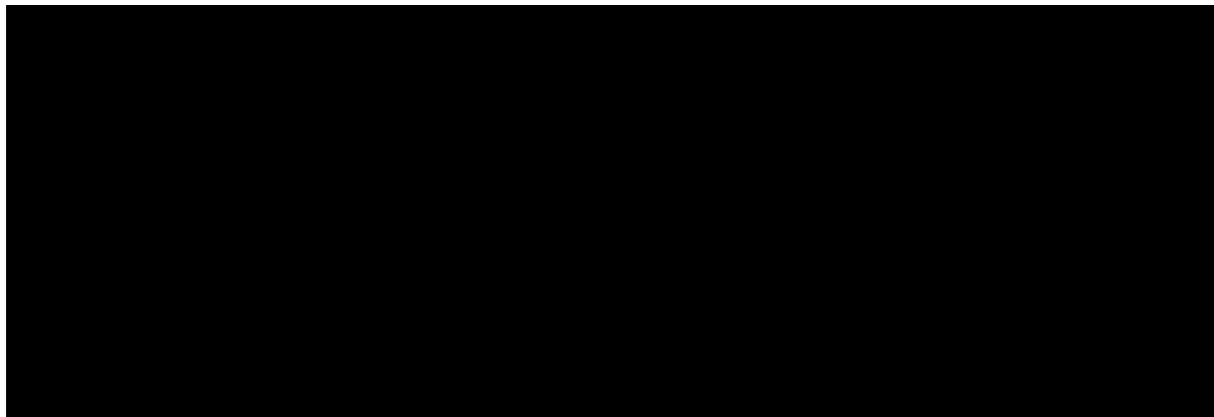
5) PPK Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran PPK Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada sebesar Rp. 22.894.045.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir Juni 2015 sebesar Rp. 5.091.566.850,- (22,24%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II termasuk untuk kegiatan koordinasi kedeputian sebagaimana terdapat pada Tabel 13 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing UKE II terlihat pada Gambar 8.

Permasalahan yang dihadapi PPK Deputi SDA LH Antara lain :

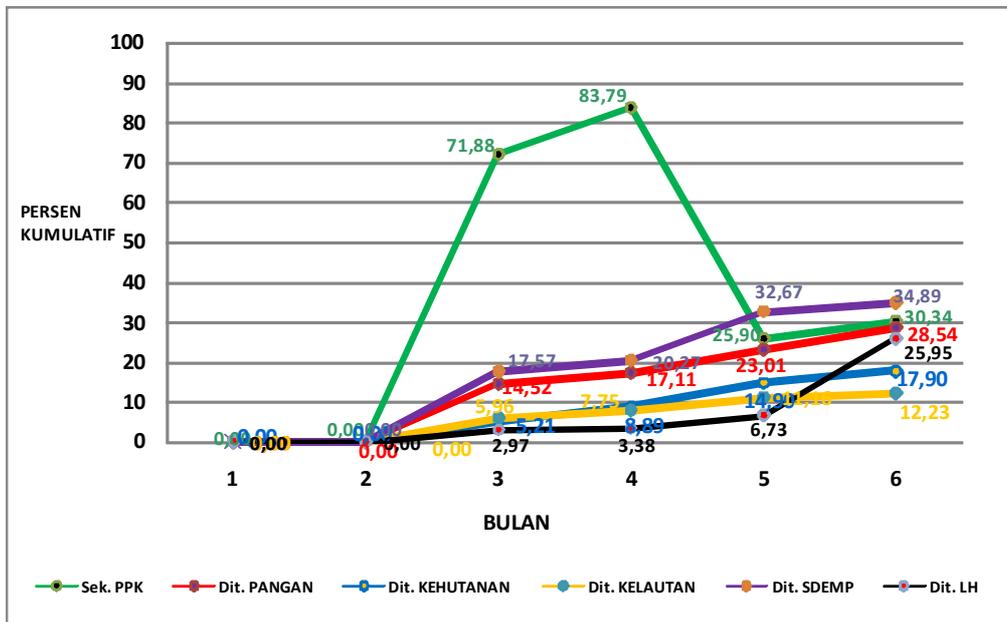
- UP yang relatif kecil
- Waktu Pencairan TUP yang terlalu lama
- Pemeriksaan berkas sebaiknya secara keseluruhan, tidak dilakukan bertahap agar tidak memakan waktu yang begitu lama.
- Aplikasi SAS Bendahara yang sering eror ketika melakukan input data.
- Harus dilakukan sosialisasi untuk perubahan ataupun peraturan terbaru

TABEL 13
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI SDALH TRIWULAN II TAHUN 2015



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

GAMBAR 8
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI SDALH TRIWULAN II TAHUN 2015



6) PPK Deputy Bidang Sarana dan Prasarana

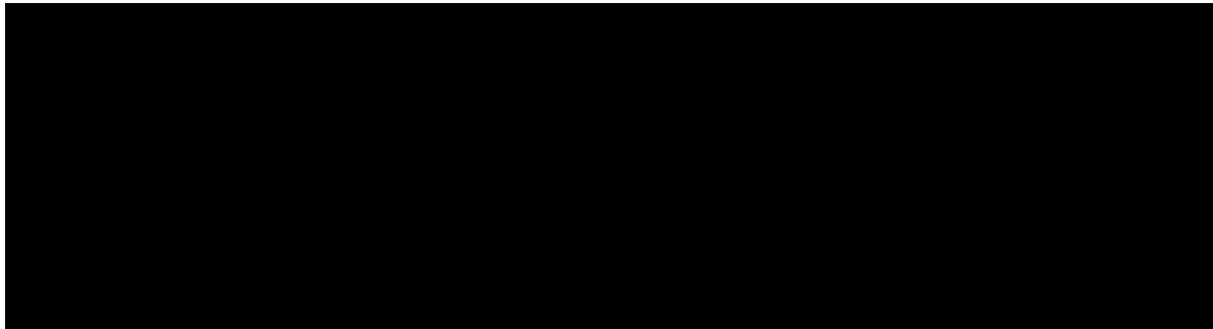
Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Sarana dan Prasarana pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 51.341.951.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 24.066.860.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 27.275.091.000,-.

Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 14 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 9.

Realisasi anggaran PPK Deputy sarana prasarana masih rendah disebabkan antara lain :

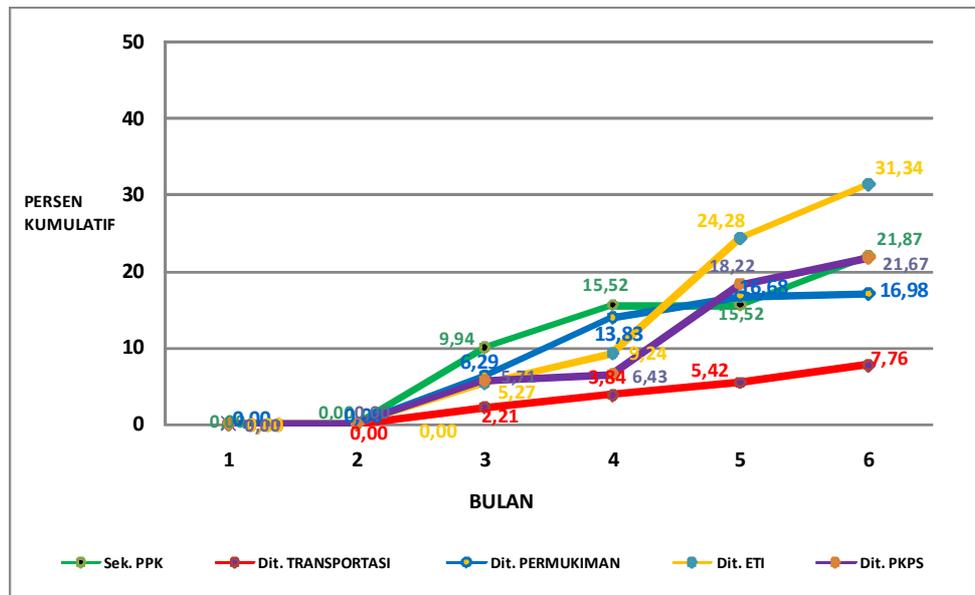
- Untuk kegiatan PHLN ADB dalam masa procurement memakan waktu dikarenakan proses surat menyurat yang harus di review dan di kirim ke ADB Manila.
- Hibah WB, pihak konsultan belum menyerahkan inception report, sehingga belum bisa dilakukan penagihan.
- Keterlambatan uang persediaan TUP dan jatah UP

TABEL 14
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA TRIWULAN II TAHUN 2015



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

GAMBAR 9
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI SARANA DAN PRASARANA TRIWULAN II TAHUN 2015



Pinjaman yang dikelola oleh Direktorat Transportasi adalah :

Regional Road Development Project (RRDP) - Study on Indonesia Transport Sector Development Strategy and Policy (Loan 2817-INO). Pinjaman yang digunakan untuk meningkatkan kinerja sektor transportasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia ini direncanakan akan selesai pada 30 November 2016. Dengan alokasi Rp 11.285.000.000,-, sampai dengan triwulan II tahun 2015 ini, dana belum mampu diserap, karena masih menunggu *No Objection Letter (NOL)* dari ADB terkait *Financial Proposal*, lalu setelahnya penandatanganan kontrak kegiatan.

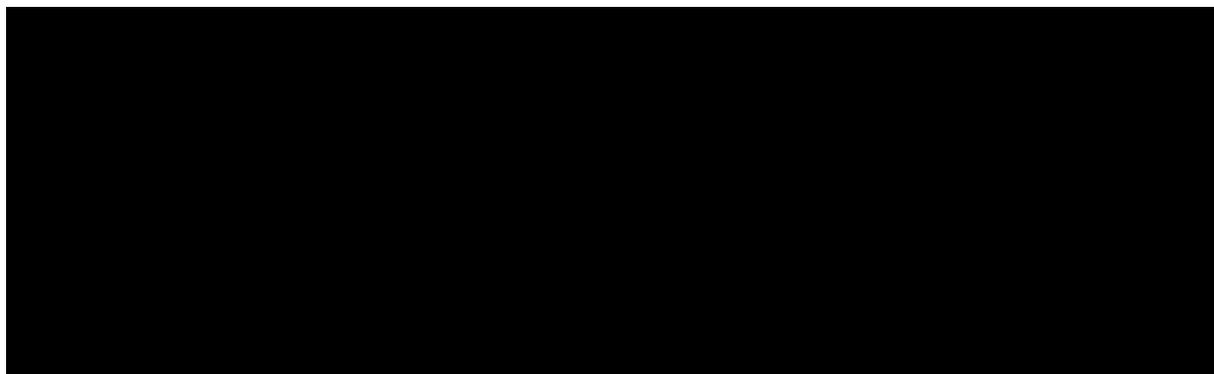
Hibah langsung yang dikelola oleh Direktorat Transportasi adalah :

- a. *Consulting Services for the Preparation of a Pre-Feasibility in Urban Mobility Denpasar Project* - BMZ ID 2099 15 356 – KfW. Hibah ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Kota Denpasar dalam menyusun strategi 5 tahunan transportasi umum yang atraktif, aman dan terjangkau secara ekonomi di Kota Denpasar telah dimulai pada tanggal 25 November 2014 dan akan berakhir pada 1 Desember 2016. Dengan alokasi dana sebesar EUR 229,450 (Rp. 3.277.857.142,-). Saat ini tengah menunggu proses pembayaran termin ke-3 dan proses pengajuan pembayaran termin ke-4.
- b. *Technical Assistance for The Surabaya Urban Transport Coridor Development Project* - TF 016825 – Bank Dunia. Dengan alokasi USD 1.250.000.000 (Rp. 15.625.000.000), hibah ini bertujuan untuk Penyusunan studi kelayakan untuk mendukung rencana investasi Pemerintah Kota Surabaya dalam pembangunan Kereta Api Cepat Perkotaan yang dirancang menggunakan skema pembiayaan PPP dan kemungkinan pinjaman dari *World Bank* yang akan menjadi pertimbangan Pemerintah Republik Indonesia. Sampai dengan Triwulan II ini sedang dilaksanakan persiapan pembahasan *inception report*.

7) PPK Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah tahun 2015 sebesar Rp. 39.014.248.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 34.280.000.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 4.734.248.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir Juni 2015 ini mencapai Rp. 7.205.444.815,- (18,47%) sebagaimana terdapat pada Tabel 15.

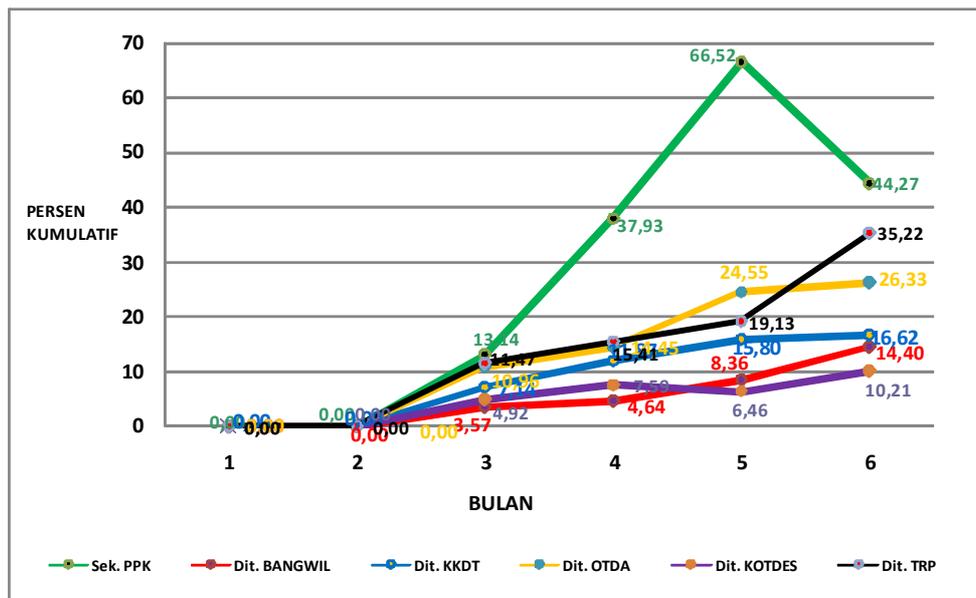
TABEL 15
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2015



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

Perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah terlihat pada Gambar 10.

GAMBAR 10
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2015



Pelaksanaan pinjaman *Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RISE) II* yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Wilayah bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan dengan berbasis pada sumberdaya lokal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki pengelolaan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, serta penguatan institusi lokal di tingkat Desa. Alokasi DIPA 2015 adalah sebesar Rp 4.070.000.000 dan direncanakan akan diserap pada semester 2 tahun 2015. Hambatan yang ada adalah masih proses pengadaan. Sedang dimintakan persetujuan JICA atas hasil evaluasi teknis. Diprediksi SPMK mundur ke September 2015. Diusulkan besaran Uang Muka 15% serta penjadwalan penarikan invoice konsultan.

8) PPK Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan di Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan dalam rangka mendukung penyusunan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional bidang pendanaan pembangunan (RKP 2015) dan rencana pendanaan nasional. Kedeputan Bidang Pendanaan

Pembangunan pada tahun anggaran 2015 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15.410.000.000,-

Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.570.185.321,- (29,66%) sebagaimana terdapat pada Tabel 16.

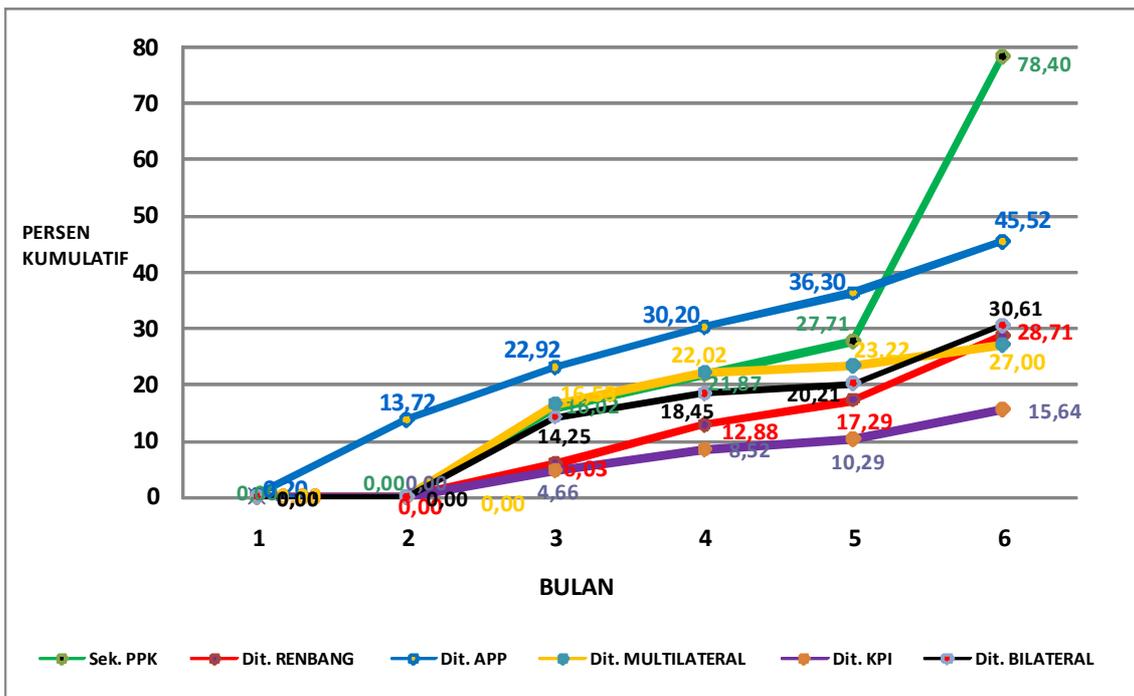
TABEL 16
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN 2015



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

Perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja Kedeputusan Bidang Pendanaan Pembangunan terlihat pada Gambar 11.

GAMBAR 11
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI PENDANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN 2015



9) PPK Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

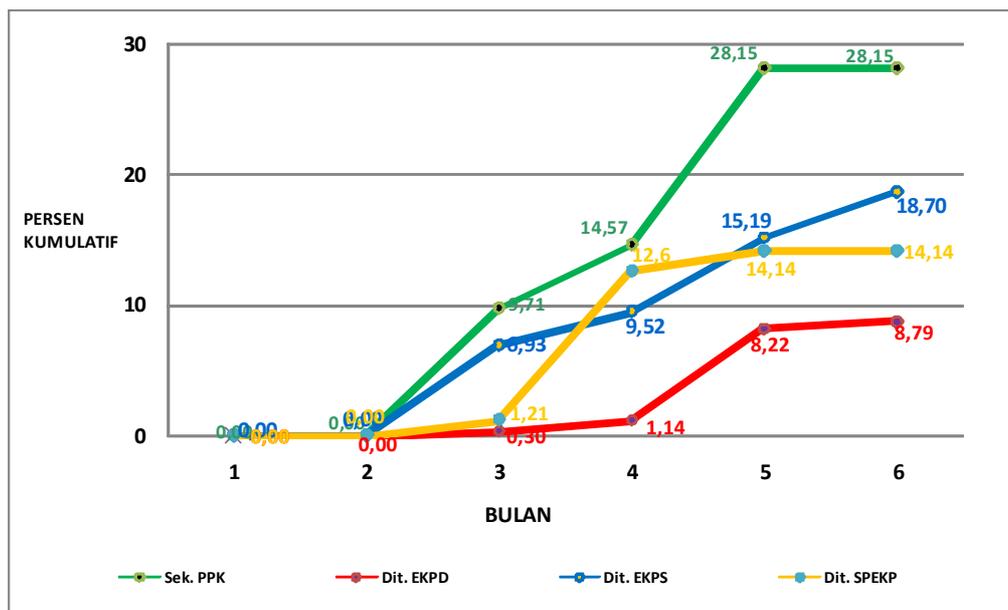
Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan sebesar Rp. 14.690.000.000,-, dengan realisasi penyerapan mencapai sebesar Rp. 1.750.856.606,-(11,92%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II termasuk untuk kegiatan koordinasi kedeputian. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 17 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 12.

TABEL 17
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TRIWULAN II
TAHUN 2015



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

GAMBAR 12
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN 2015



10) PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Alokasi anggaran PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 16.624.000.000,- yang terdiri dari RM sebesar Rp. 6.724.000.000,- dan dana PLN sebesar Rp. 9.900.000.000,-, dengan realisasi penyerapan RM sampai dengan Juni 2015 sebesar Rp. 1.197.068.857,- (17,80%), sementara realisasi penyerapan dana PLN mencapai 15,07% atau sebesar Rp. 1.491.758.153,- Dana program ini dialokasikan untuk kegiatan pengairan dan irigasi di Direktorat Pengairan dan Irigasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Progres pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. *Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP II)* – Bank Dunia (8027 – ID).

Dengan jumlah pinjaman sebesar USD 150.000.000 dan akan berakhir pada 30 November 2016, pinjaman ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai dan irigasi serta meningkatkan produktivitas pertanian di lahan beririgasi. Alokasi tahun 2015 berjumlah Rp 2.995.209.001,- dan telah menyerap Rp 73.908.661,-.

- b. *Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities* - JICA (IP 551).

Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk mengurangi kerusakan banjir di kota-kota terpilih dengan memperbaiki infrastruktur pengendali banjir, meningkatkan kapasitas pengelolaan DAS dan pengembangan rencana manajemen banjir dengan tujuan untuk mendukung agenda nasional adaptasi perubahan iklim, dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan industri di kota-kota di Indonesia. Adapun kota-kota terpilih yang menjadi prioritas adalah Padang; Palembang; Bandung; Surabaya (Wonokromo); Surabaya (Brangkal); dan Gorontalo. Alokasi 2015 sebesar JPY 9.088.810 (Rp 886.159.000,-). Lamanya proses keluarnya SP3, sehingga realisasi berdasarkan SPP sebesar Rp. 421,164,761.

- c. *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program Project 1* – ADB (INO-2500/INO-2501(SF)).

Alokasi tahun 2015 adalah sebesar USD 793.033 (Rp 7.613.117.000) dan dana pendamping sebesar Rp 1.031.484.000,-. Pinjaman ini telah mengalami perpanjangan masa laku pinjaman sampai dengan 31 Mei 2016 atau mendapat perpanjangan 23 bulan. Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu di Wilayah Sungai Citarum merupakan tujuan dari pinjaman ini. Alokasi tahun 2015 untuk kegiatan *Independent Monitoring & Evaluation* swakelola dialokasikan sebesar Rp 2.000.000.000,-. Permasalahan yang dihadapi adalah

lamanya proses keluarnya SP3. Realisasi berdasarkan SPP sebesar Rp. 765,682,030

- d. *Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP)* – Bank Dunia (7669-IND).

Pinjaman ini akan berakhir pada 01 Juli 2015 setelah mendapat perpanjangan masa laku dari 31 Desember 2013. Alokasi 2015 sebesar Rp 408.742.000,- dan sampai dengan Triwulan II telah diserap dana Rp 321.975.470,- untuk swakelola *Independent Monitoring & Evaluation*.

- e. *Decentralized Irrigation System Improvement Project in Eastern Region of Indonesia II (DISIMP II)* – JICA (IP 547).

Alokasi 2015 mendapat pagu dana sebesar Rp 1.750.000.000,- yang digunakan untuk kegiatan *Independent Monitoring and Evaluation*. Sampai dengan triwulan II belum ada penyerapan dana karena masih ada perbaikan invoice untuk paket konsultan

- f. *Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management (PIRIMP)* – JICA (IP 546).

Alokasi 2015 mendapat pagu dana sebesar Rp 1.750.000.000,- yang digunakan untuk kegiatan *Independent Monitoring and Evaluation*. Permasalahan yang dihadapi adalah lamanya proses keluarnya SP3, realisasi berdasarkan SPP sebesar Rp. 1,274,435,075,-.

Rendahnya penyerapan PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu diantaranya :

- Konsultan sering tidak lengkap atau tidak sesuai dengan aturan pada saat menyerahkan back up invoice
- Pelaksanaan Rapat di luar kantor yang sangat selektif
- Persetujuan Kegiatan PLTA baru bisa dilaksanakan bulan Juni 2015
- Pelaksanaan perjalanan dinas yang banyak tertunda

11) PPK Sekretariat *Infrastructure Reform Sector Development Program*

Alokasi anggaran pada PPK Sekretariat *Infrastructure Reform Sector Development Program* sebesar Rp. 76.101.250.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 23.214.980.000,- dan dana PLN sebesar Rp. 52.886.270.000,- untuk melaksanakan kegiatan *Infrastructure Reform Sector Development (IRSDP)/ Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD)*. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Juni 2015 sebesar Rp. 2.289.004.359,- (3,01%).

Kegiatan P2MPD bertujuan memberikan bantuan teknis untuk memfasilitasi penyiapan proyek infrastruktur dengan mengikutsertakan sektor swasta, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dengan rincian kegiatan:

- a) Penyusunan Program dan Rencana Kerja Teknis/Program (IRSDP, Sekretariat WASAP, Koordinasi Perencanaan Infrastruktur, Sekretariat PPITA)
- b) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan
- c) Pembinaan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
- d) Pengadaan Peralatan
- e) Monitoring dan Evaluasi

12) PPK Program Pengelolaan Hibah MCC

Program MCC-*Compact Agreement* (Perjanjian Hibah *Program Compact*) dilakukan selama 5 tahun dengan nilai USD 600 juta. Tujuan dari *Program Compact* adalah mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tiga program yaitu: (1) Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity*), (2) Kesehatan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mencegah Anak Pendek (*Community-based Health and Nutrition*), (3) Modernisasi Sistem Pengadaan (*Procurement Modernization*). *Program Compact* di Indonesia dimulai sejak ditandatanganinya *Implementation Letter* oleh Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dengan VP-*Department of Compact Operations* – MCC pada tanggal 2 April 2013 dan akan berakhir pada tanggal 1 April 2018.

Sesuai dengan PMK No. 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah MCC bahwa pelaksanaan anggaran yang berasal dari Hibah MCC dialokasikan dalam DIPA Satker Pengelola Hibah MCC. Selain alokasi dari Hibah MCC, dalam DIPA Satker juga dialokasikan dana yang bersumber dari rupiah murni untuk operasional Satker dan penggantian pajak terkait hibah *Program Compact*. Pelaksanaan anggaran HLN yang dialokasikan dalam DIPA tersebut menggunakan mekanisme Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) sedangkan untuk alokasi Rupiah Murni menggunakan mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Alokasi anggaran PPK Pengelolaan Hibah MCC pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 223.000.000.000,-, terdiri dari dana RM sebesar Rp. 13.000.000.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 210.000.000.000,-. Realisasi penyerapan sampai dengan triwulan II mencapai Rp 122.692.453.140,-.

13) Satker Dana Dekonsentrasi Tahun 2015

Dari 33 provinsi pelaksana Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015, sampai dengan Triwulan II, baru 25 satker provinsi yang melakukan penarikan dana, dengan total dana Rp 6.021.815.254,- (18,25%). Pada triwulan II ini jumlah provinsi yang telah melaksanakan kegiatan meningkat jumlahnya dari jumlah provinsi pada triwulan I, yang hanya 10 satker provinsi.

TABEL 18
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SATKER DEKOSENTRASI 2015
TRIWULAN II TAHUN 2015

NO	SATKER	PENYERAPAN					
		JAN-MAR	APR	MEI	JUN	JUMLAH	%
1	030060 - Provinsi Jawa Tengah	-	106.420.600	83.273.247	-	189.693.847	20,72
2	040069 - Provinsi DIY	-	67.703.351	110.890.000	47.077.300	225.670.651	24,52
3	050060 - Provinsi Jawa Timur	-	59.197.900	55.950.000	-	115.147.900	12,21
4	060004 - Provinsi Aceh	-	-	-	18.779.075	18.779.075	1,80
5	070060 - Provinsi Sumatera Utara	-	-	91.300.300	95.054.900	186.355.200	18,51
6	080019 - Provinsi Sumatera Barat	197.615.788	97.073.500	-	-	294.689.288	30,73
7	110060 - Provinsi Sumatera Selatan	-	148.235.700	79.164.400	156.607.873	384.007.973	41,72
8	120022 - Provinsi Lampung	-	89.470.000	92.053.100	51.100.000	232.623.100	26,37
9	130019 - Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	-	131.917.900	-	26.374.100	158.292.000	16,67
10	140018 - Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	131.674.800	63.762.400	195.437.200	20,34
11	150060 - Provinsi Kalimantan Selatan	106.079.800	96.551.450	93.804.300	44.272.700	340.708.250	35,44
12	170021 - Provinsi Suawesi Utara	66.988.220	137.676.300	111.160.450	-	315.824.970	29,26
13	180060 - Provinsi Sulawesi Tengah	120.230.200	67.393.800	59.136.900	61.768.600	308.529.500	28,57
14	200019 - Provinsi Sulawesi Tenggara	101.434.700	111.436.000	56.743.800	-	269.614.500	26,23
15	210019 - Provinsi Maluku	-	-	52.018.000	85.017.424	137.035.424	11,51
16	220060 - Provinsi Bali	-	-	194.736.850	-	194.736.850	19,95
17	230020 - Provinsi NTB	86.131.600	44.905.150	-	-	131.036.750	13,45
18	240026 - Provinsi NTT	-	93.232.000	186.744.200	95.671.300	375.647.500	34,84
19	260070 - Provinsi Bengkulu	145.760.000	75.000.000	-	-	220.760.000	23,48
20	280016 - Provinsi Maluku Utara	168.941.500	183.800.000	22.784.000	-	375.525.500	32,18

21	300092 -Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	73.454.701	75.000.000	148.454.701	16,25
22	310060 - Provinsi Gorontalo	105.893.625	135.257.000	130.969.500	100.193.050	72.313.175	44,39
23	320099 - Provinsi Kepulauan Riau	-	52.489.600	-	-	52.489.600	5,49
24	330096 - Provinsi Papua Barat	-	77.745.150	278.759.250	-	356.504.400	25,46
25	340030 - Provinsi Sulawesi Barat	62.949.900	-	129.578.700	129.409.300	321.937.900	30,19
		1.162.025.333	1.775.505.401	2.034.196.498	1.050.088.022	6.021.815.254	18,25

Sumber : Ditjen Anggaran, Kem. Keuangan, <http://monev.anggaran.depkeu.go.id/2015>

Secara keseluruhan pelaksanaan dana dekonsentrasi tahun 2015 di seluruh provinsi berjalan dengan baik. Beberapa kendala dalam pelaksanaan yang dapat diinventarisasi dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi secara keseluruhan antara lain:

1. Dana

- a. Ketersediaan anggaran terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan 8 fokus kegiatan dekonsentrasi 2015
- b. Anggaran dekonsentrasi kurang memadai sehingga belum semua kegiatan prioritas nasional dapat tertampung
- c. Lamanya proses pencairan dana dekonsentrasi dan peruntukannya untuk beberapa kegiatan
- d. Keterlambatan proses pencairan karena harus menunggu kelengkapan administrasi (SPJ) kegiatan sebelumnya
- e. Dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas hanya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi, belum terakomodirnya belanja terkait Jasa Konsultan Pihak ke 3

2. SDM

- a. Pergantian staf pengelola dana dekonsentrasi di beberapa satker
- b. Terbatasnya staf pelaksana
- c. Keterbatasan tenaga pelaksana dan data

3. Waktu

- a. *Time line* setiap proyek tidak mungkin dicapai dan ada aturan yang berbeda dengan APBD Provinsi
- b. Keterbatasan waktu penilaian pangripta kabupaten/kota
- c. Waktu pelaksanaan kegiatan kadang-kadang bersamaan dengan kegiatan APBD

4. Koordinasi
 - a. Kurangnya koordinasi/sinergi antara pelaksana kegiatan di bidang Pelaksana dengan anggota satker dalam perencanaan dan pelaksanaan dekonsentrasi, sehingga mengakibatkan seringnya revisi POK
 - b. Perlu adanya koordinasi yang lebih intensif antara bidang perencanaan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan DIPA
 - c. Sulitnya koordinasi antar bidang karena volume kegiatan bidang yang cukup tinggi
5. Perencanaan
 - a. Pelaksanaan perencanaan dana dekonsentrasi perlu disiapkan dengan matang
 - b. Juklak/Juknis yang kurang fleksibel
 - c. Kendala di awal pelaksanaan DIPA, RKA KL yang diterima namun masih gelondongan atau belum terperinci per akun kegiatan sehingga harus dilakukan revisi kembali
 - d. Adanya perubahan sistem aplikasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dekonsentrasi seperti pencairan, pembukuan, dan pengadministrasian lainnya pada tahun berjalan
 - e. Dalam pedoman pelaksanaan dekonsentrasi Bappenas, fokus dan arahan terhadap hasil yang akan dicapai kurang jelas
6. Administrasi
 - a. SK KPA, PPK dan bendahara menjadi satu SK yang ditandatangani gubernur, sehingga ketika terjadi mutasi pejabat maka pelaksanaan kegiatan menunggu SK revisi
 - b. Penggantian bendahara pengeluaran menjadi kendala dalam perubahan administrasi kegiatan dan memerlukan waktu dalam penyesuaian tahapan kegiatan
 - c. Adanya kendala internal dikarenakan adanya penggantian kuasa pengguna anggaran sehingga memerlukan proses revisi SK dan adanya proses pergeseran dan penambahan akun baru pada RKA

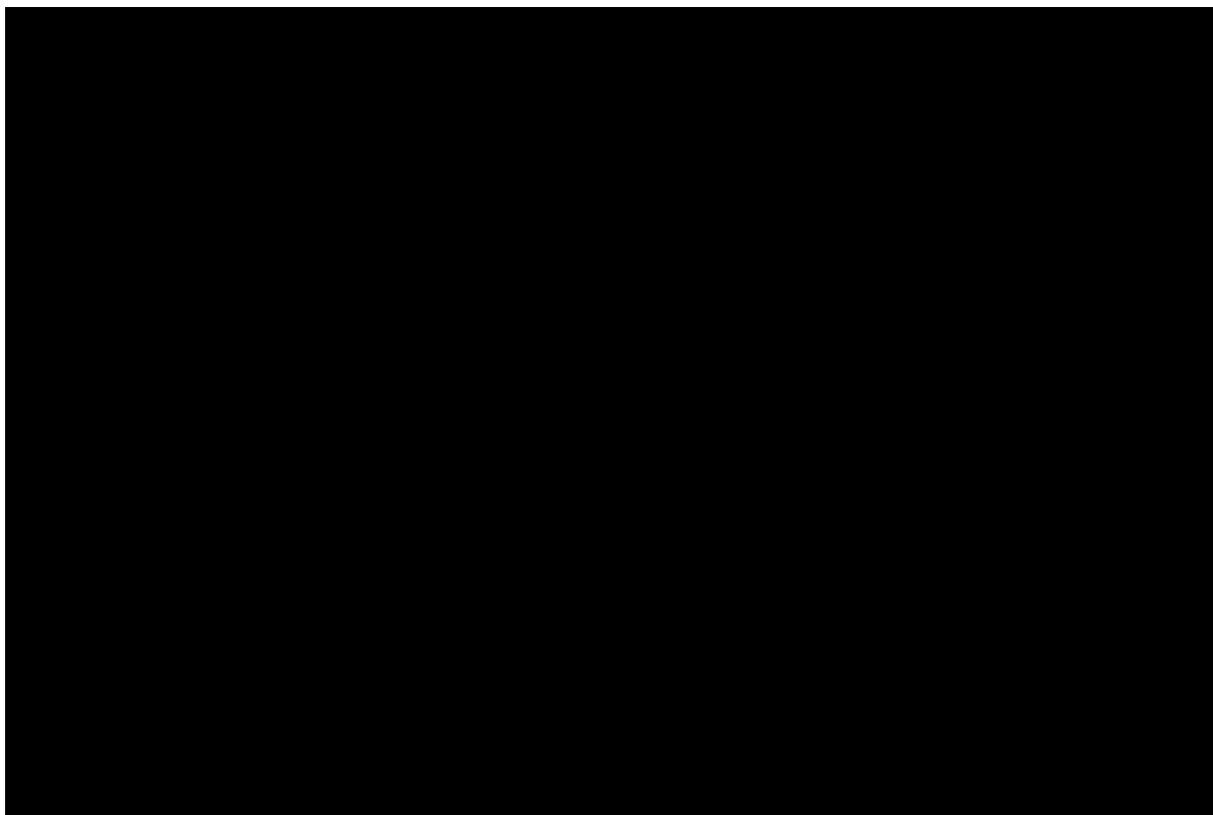
B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Untuk mendukung pencapaian sasaran program, pada tahun 2015 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 677.029.873.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 371.112.914.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 305.916.959.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Juni 2015 mencapai Rp. 163.889.153.717,- (24,21%) yang

terdiri dari dana RM sebesar Rp. 101.427.502.306,- (27,33%), sedangkan dana PHLN sebesar Rp. 62.461.651.411,- (20,42%).

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dikelola oleh 5 (lima) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing PPK dapat dilihat pada Tabel 19.

TABEL 19
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015

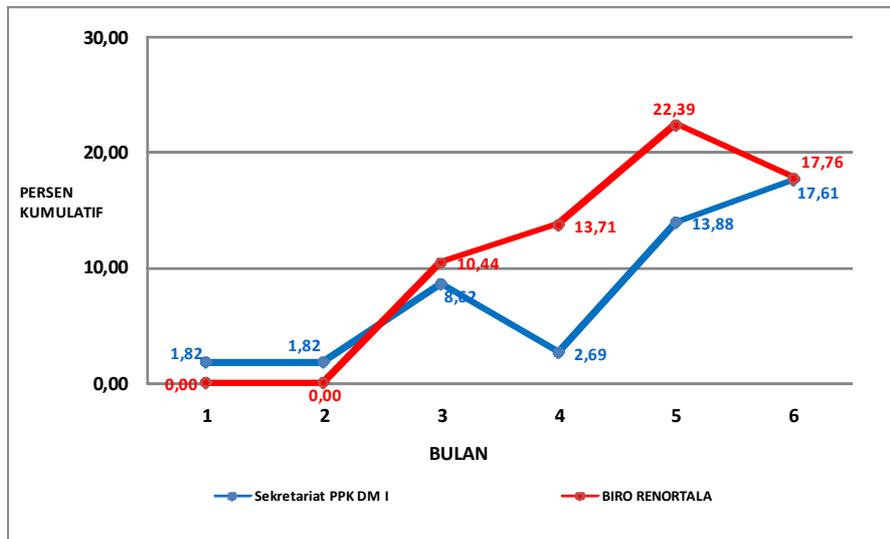


Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

1) PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas I

Alokasi anggaran pada PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas I sebesar Rp. 57.749.558.000,- dan sampai dengan Triwulan II 2015 telah menarik dana sebesar Rp. 10.177.810.803,- (17,62%). Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 19 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 13.

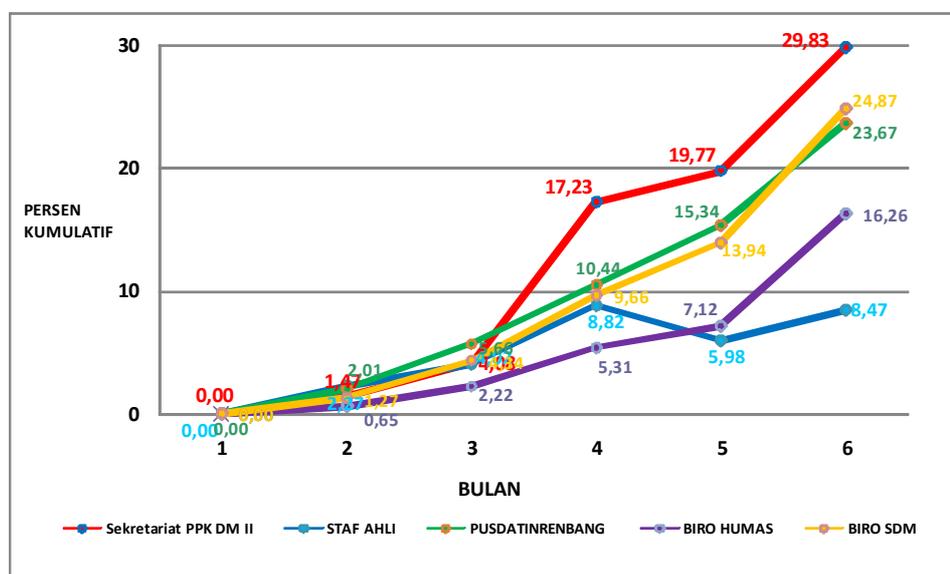
GAMBAR 13
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DUKUNGAN MANAJEMEN I TRIWULAN II TAHUN 2015



2) PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas II

Alokasi anggaran pada PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas II sebesar Rp. 31.541.362.000,- dan telah ditarik Rp. 5.607.222.844,- (17,78%). PPK DM II mengkoordinasikan kegiatan pada Staf Ahli, Pusat Data Informasi Perencanaan Pembangunan, Biro Humas dan TU Pimpinan, Biro SDM, dan Biro Hukum. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 19 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 14.

GAMBAR 14
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DUKUNGAN MANAJEMEN II TRIWULAN II TAHUN 2015



3) PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas III

Alokasi anggaran pada PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas III sebesar Rp. 225.625.001.000, dan telah dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 75.919.868.854,- (33,65%).

4) PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas IV

Alokasi anggaran pada PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas IV sebesar Rp. 360.673.952.000,- yang terdiri dari Rp 54.756.993.000,- dana RM, dan dan PLN sebesar Rp. 305.916.959.000. Realisasi anggaran sebesar Rp. 71.824.251.216,- (19,91%). Berikut status pelaksanaan PLN yang dikelola oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana:

- a. *Professional Human Resources Development Project (PHRDP) III – JICA (IP-535)*. Alokasi tahun 2015 sebesar Rp JPY 116,667 juta (Rp 14 M). Sedang diproses untuk pembayaran konsultan dan DLS.
- b. *Professional Human Resources Development (PHRD) IV – JICA (IP-568)*. Alokasi DIPA 2015 adalah JPY 901.321,1 juta. Pada Triwulan II belum ada penyerapan. Pembayaran terbesar akan dilakukan pada bulan September (masuk kuliah).
- c. *Scholarship Program for Strengthening Reforming Institutions (SPIRIT) – Bank Dunia (8010-ID)*. Alokasi DIPA 2015 adalah sebesar USD 24.306.000 dan telah diserap USD 1.159.364 untuk pembayaran *tuition fee* dan *allowance*.

Ada beberapa permasalahan yang terdapat pada PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas IV, antara lain :

1. PHRDP III
 - Keterlambatan Pencairan Dana
 - Kekurangan Pembayaran Konsultan dan perbedaan permintaan rencana Pembayaran dengan invoice yang ditagihkan
2. PHRD IV
 - Tertundanya pembayaran karena Mekanisme Replenisme baru minimal 70%
 - Belum terpilihnya Konsultan yang sesuai dengan kriteria
3. SPIRIT
 - Komitmen PA terhadap diklat Non Gelar kurang
 - Peserta gagal berangkat krn Visa
 - Peserta terlalu singkat mengumpulkan berkas
 - Tertundanya peserta program diklat gelar (LOA lambat)

5) PPK Dana Operasional Menteri

Alokasi anggaran pada PPK Dana Operasional Menteri sebesar Rp 1.200.000.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 360.000.000,- (25,00%)

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Alokasi anggaran tahun 2015 pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas sebesar Rp. 40.000.000.000,- dikelola oleh PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.489.747.800,- (3,72%).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur termasuk penyediaan sistem informasi perencanaan pembangunan nasional, pengembangan sistem data/informasi perencanaan pembangunan, dan sistem data/informasi dalam pengelolaan aset (Barang Milik Negara). Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- 2) Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional.
- 3) Peningkatan Kualitas Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional.

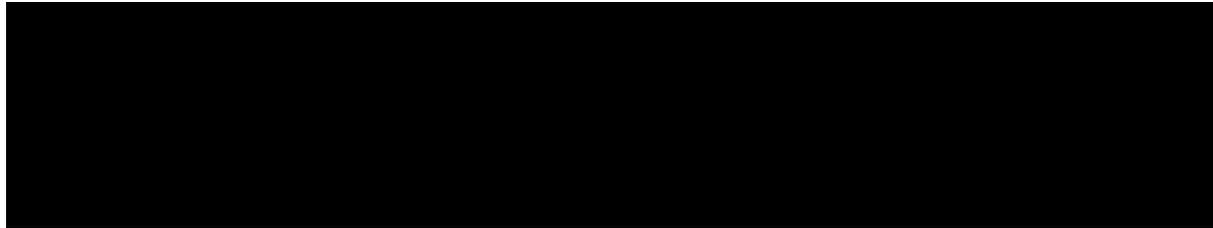
Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II masih sangat kecil, dikarenakan :

- a. Meubelair masih dalam proses pembuatan, namun kontrak sudah terlaksana
- b. Gedung arsip (Warung Buncit) masih dalam proses lelang

D. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

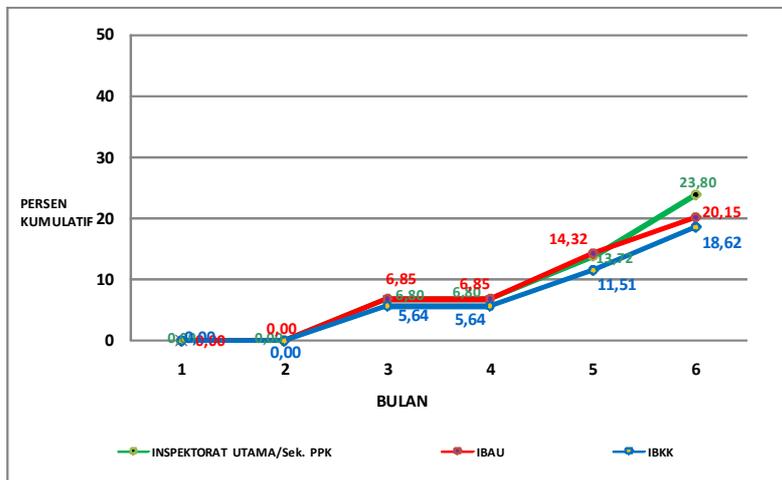
Alokasi anggaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas sebesar Rp. 5.275.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.042.316.582,- (19,76%) yang dikelola oleh PPK Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas. Anggaran program ini dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran pada setiap unit kerja dapat dilihat pada Tabel 20 dan perkembangan realisasi setiap bulan pada Gambar 15.

TABEL 20
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS
APARATUR BAPPENAS TRIWULAN II TAHUN 2015



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

GAMBAR 15
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAWASAN AKUNTABILITAS
APARATUR BAPPENAS TRIWULAN II TAHUN 2015



BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan Maret 2015 (Triwulan II), dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 1.281.869.794.000,- terdiri dari dana RM sebesar Rp. 660.164.354.000,-, dan PHLN sebesar Rp. 621.705.440.000,-. Dari sejumlah dana tersebut, realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp. 334.170.003.256,- (26,07%), yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 153.933.907.260,- (23,32%), dan dana PHLN sebesar Rp. 180.236.095.996,- (28,99%).
2. Realisasi penyerapan anggaran Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan Triwulan II masih rendah, disebabkan antara lain:
 - 1) Beberapa kegiatan masih dalam proses lelang;
 - 2) Adanya kegiatan yang baru akan dimulai pada semester II;
 - 3) Pelaksanaan Rapat di luar kantor yang sangat selektif;
 - 4) Adanya rencana restrukturisasi Bappenas;

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada saat proses perencanaan, kepada semua unit kerja pelaksana kegiatan dan PPK disarankan:
 - a. Dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal atau rencana kerja yang telah disusun.
 - b. Agar dapat mempersiapkan lebih dini dalam menyusun legalisasi administrasi kegiatan antara lain berupa surat-surat keputusan dan data pendukung lainnya.

- c. Mempelajari tatacara/pedoman dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan, proses pencairan anggaran, pelaporan kegiatan/program yang akan dilaksanakan.
 - d. Pencatatan kegiatan ke dalam DIPA perlu lebih diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan register seperti MAK, kode kegiatan yang mengakibatkan perlu dilaksanakan revisi DIPA.
2. Untuk kelancaran proses pencairan, khususnya kepada pihak Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerbit SPM serta para petugas pendukungnya agar dapat berkoordinasi dan memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada unit kerja yang mengusulkan (melalui PPK) jika terdapat hal-hal yang perlu segera diperbaiki/disempurnakan/diselesaikan dalam proses pengajuan usulan pencairan dana. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan proses pencairan sehingga waktu yang dibutuhkan dalam proses pencairan menjadi lebih cepat, dan sesuai dengan rencana.
 3. Penyampaian laporan data realisasi penyerapan anggaran harus tetap konsisten berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setiap bulannya (sampai dengan akhir bulan).
 4. Perlu meningkatkan koordinasi dengan KPPN, Kanwil Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran dalam aplikasi SPAN sehingga pencairan dana tidak mengalami keterlambatan.
 5. Perlunya konsep perencanaan yang matang, jelas dan terukur dalam penggunaan anggaran. Sehingga penggunaan anggaran akan tepat sasaran dan indikator kinerja yang direncanakan akan tercapai.